

STRATEGI DAN ALOKASI DANA KETAHANAN PANGAN INDONESIA

13

Niken Paramita Purwanto

Abstrak

Tahun depan, dunia tidak hanya dihadapkan pada ancaman resesi global, melainkan juga ancaman krisis pangan. Tulisan ini mengkaji strategi pemerintah terkait kenaikan inflasi serta alokasi dana ketahanan pangan Indonesia. Pemerintah berupaya menjaga ketahanan pangan melalui empat strategi: (1) keterjangkauan dari sisi peningkatan akses pangan masyarakat; (2) menjaga ketersediaan pangan dengan menjaga pasokan stok pangan melalui peningkatan produktivitas dalam negeri dan mensubstitusikan kegiatan yang tergantung pada negara lain; (3) peningkatan kualitas dan keamanan pangan; (4) menjaga ketahanan serta keberlangsungan sumber daya alam. Komisi IV dan VI DPR RI melalui fungsi pengawasan dan legislasi perlu memastikan agar penggunaan dana sesuai dengan kecukupan dan efektif di berbagai sektor yang melaksanakan program ketahanan pangan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendahuluan

Tahun 2023 diprediksi menjadi tahun penuh tantangan, ancaman resesi global serta krisis pangan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Penyebabnya, kenaikan suku bunga yang tajam di pasar keuangan global. Ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas pangan merupakan kebutuhan dasar dan utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat agar Indonesia terhindar dari krisis pangan. Tahun 2020-2021 menjadi tantangan pemenuhan pangan masyarakat karena faktor alam yang mengakibatkan turunnya produktivitas seperti kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) (kompasiana.com, 16 Oktober 2022).

Sektor pertanian dan perikanan juga dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19 yang mengancam ketersediaan pangan masyarakat. Memasuki tahun 2022, pandemi Covid-19 mulai terkendali tetapi muncul tantangan baru di tingkat global dan domestik. Kondisi geopolitik dunia yang tidak stabil dan perang Rusia-Ukraina berpotensi mengganggu produksi dan rantai pasokan pangan, menyebabkan tingginya harga komoditas dalam negeri dan menimbulkan risiko krisis pangan. Selain itu, munculnya permasalahan penyakit mulut dan kuku (PMK) membutuhkan perhatian yang serius dan langkah antisipasi untuk menghindari penyebaran skala luas yang akan memberikan dampak kerugian ekonomi



akibat turunnya produktivitas, kematian, dan harga jual murah (merdeka.com, 12 Oktober 2022).

Di sisi lain, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Implikasinya, terjadi penurunan permintaan produk pangan dan hewani, khususnya masyarakat berpendapatan rendah yang cenderung mengurangi jumlah dan mutu pangan yang dikonsumsi. Hal ini mengakibatkan angka inflasi yang semakin meningkat. Inflasi di dalam negeri sebagian besar disebabkan kenaikan harga komoditas pangan pokok seperti daging sapi, daging ayam, telur, beras, gula pasir, minyak goreng, susu, cabai, dan garam. Jika pemerintah tidak mengelola dan menjaga *supply* pangan di pasar, maka inflasi bisa meningkat lagi sampai Desember 2022. Tulisan ini mengkaji strategi pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan pokok (ketahanan pangan) agar tidak terjadi lonjakan harga yang mengakibatkan lonjakan inflasi ke depan.

Strategi Ketahanan Pangan Indonesia

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pemerintah akan berusaha memperkuat ketahanan pangan terhadap kenaikan inflasi nasional. Tingkat inflasi nasional sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan (*volatile foods*) (Bisnis Indonesia, 17 Oktober 2022), sehingga perlu langkah utama yang harus dilakukan untuk menjaga harga-harga pangan pokok agar tidak meningkatkan inflasi.

Menurut Menko Airlangga, penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya melalui empat strategi (ekon.go.id, 17 Oktober 2022). *Pertama*, keterjangkauan dari sisi peningkatan akses pangan masyarakat. Pemerintah mendorong pemanfaatan digitalisasi dari pasar serta kerjasama dengan BUMN mendistribusikan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. *Kedua*, menjaga stok dan pasokan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas dalam negeri dan mensubstitusikan kegiatan yang tergantung pada negara

Tabel 1. Harga Kebutuhan Pokok Nasional Juni dan Oktober 2022

Komoditas	Sat	15 Jun 2022	14 Okt 2022	(%)
Beras Premium	kg	12.500	12.800	2,40
Beras Medium	kg	10.400	10.900	4,81
Gula Pasir	kg	14.700	14.300	-2,72
Minyak Goreng Curah	Lt	16.400	13.600	-17,07
Minyak Goreng Kemasan Sederhana	Lt	22.600	16.000	-29,20
Minyak Goreng Kemasan Premium	Lt	25.800	21.000	-18,60
Kedelai Impor	kg	14.100	14.400	2,13
Tepung Terigu	kg	11.700	13.000	11,11
Daging Sapi Paha Belakang	kg	135.900	135.700	-0,15
Daging Ayam Ras	kg	38.300	34.300	-10,44
Telur Ayam Ras	kg	29.500	28.500	-3,39
Cabai Merah Besar	kg	68.400	45.000	-34,21
Cabai Merah Keriting	kg	70.400	47.400	-32,67
Cabai Rawit Merah	kg	89.900	58.800	-34,59
Bawang Merah	kg	50.600	34.000	-32,81
Bawang Putih Honan	kg	28.000	26.400	-5,71

Sumber: Kemendag, Diolah, 2022

lain. *Ketiga*, peningkatan kualitas dan keamanan pangan. Pemerintah melakukan penerapan budidaya pertanian yang baik (*good agricultural practices*), penanganan pascapanen yang baik (*good handling practices*), pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI), dan pemenuhan *Sanitary* dan *Phytosanitary* (SPS) yang perlu terus dijaga. *Keempat*, menjaga ketahanan serta keberlangsungan kekayaan sumber daya alam, misalnya melalui penetapan lahan sawah yang dilindungi atau pengendalian alih fungsi lahan sawah, diversifikasi budidaya, penggunaan pupuk organik serta pemeliharaan jaringan irigasi. Ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional. Pada Tabel 1 dapat dilihat perubahan harga barang kebutuhan pokok nasional yang meliputi 16 bahan pokok antara bulan Juni 2022 dan Oktober 2022.

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong peningkatan kualitas belanja negara untuk mewujudkan ketahanan pangan yang lebih optimal dan berkeadilan sehingga dapat memberikan manfaat nyata dan melindungi seluruh masyarakat dari ancaman krisis pangan. Di tengah tantangan yang ada, sektor pertanian dan perikanan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penghasil devisa negara, dan sumber pendapatan utama rumah tangga sebagian masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui capaian beberapa indikator makro pada tahun 2022. Meskipun menurut data BPS (2022), ekonomi Indonesia pada triwulan I-2022 mengalami kontraksi sebesar 0,96% dibanding triwulan IV-2021, pertumbuhan tertinggi justru dicapai

oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,09% (kemenkeu.go.id, 2022). Secara umum, anggaran ketahanan pangan cenderung meningkat pada periode tahun 2018-2022, utamanya dimanfaatkan untuk peningkatan produksi pangan, penyediaan dukungan produksi pangan, pengelolaan perikanan dan kelautan, pembangunan infrastruktur pangan, dan dukungan bagi petani dan nelayan (kemenkeu.go.id, 2022).

Beberapa target *output* prioritas pembangunan ketahanan pangan periode 2018-2022 antara lain: (1) kawasan padi/ fasilitas penerapan budi daya padi seluas 1.215.853 Ha pada tahun 2018 menjadi 3.443.625 Ha (kumulatif) pada tahun 2022; (2) kawasan jagung/fasilitas penerapan budidaya jagung seluas 2.830.650 Ha pada tahun 2018 menjadi 3.556.672 Ha (kumulatif) pada tahun 2022; (3) kawasan kedelai/ fasilitas penerapan budi daya kedelai seluas 546.586 Ha pada tahun 2018 menjadi 898.971 Ha (kumulatif) pada tahun 2022; (4) kawasan bawang merah seluas 5.493 Ha pada tahun 2018 menjadi 22.917 Ha (kumulatif) pada tahun 2022; (5) jaringan irigasi tersier seluas 136.209 Ha pada tahun 2018 menjadi 717.186 Ha (kumulatif) pada tahun 2022; (6) bantuan kapal perikanan sebanyak 562 unit pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 75 unit pada tahun 2022; (7) bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak 720 unit pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 1.000 unit pada tahun 2022; dan (8) benih dan calon induk sebanyak 163,1 juta ekor pada tahun 2018 dan ditargetkan sebanyak 151,9 juta ekor pada tahun 2022 (kemenkeu.go.id, 2022).

Alokasi Dana Ketahanan Pangan

Menjaga ketahanan pangan merupakan salah satu kebijakan

pembangunan sektor pertanian yang tetap menjadi prioritas pemerintah hingga saat ini. Program-program strategis bidang ketahanan pangan melalui APBN terus diupayakan untuk mewujudkan kemandirian pangan di tengah tantangan yang meningkat dari sisi *supply* dan *demand*, untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan optimalisasi potensi sumber daya alam, manusia, sosial, dan ekonomi yang ada melalui strategi dan kebijakan menyeluruh dan melibatkan lintas sektor. Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan pada tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan melalui: (1) meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis; (2) mendorong terciptanya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing dengan penguatan kelembagaan usaha (korporasi), modernisasi, dan peningkatan penyuluhan; (3) mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim inovasi; (4) memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan; dan (5) mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan bendungan/waduk (kemenkeu.go.id, 2022).

Arah kebijakan ketahanan pangan tersebut diimplementasikan pada beberapa program pemerintah yang didanai melalui APBN. Anggaran ketahanan pangan digunakan untuk antara lain: (1) menjamin penyediaan pangan yang cukup dan aman bagi seluruh penduduk Indonesia; (2) peningkatan daya saing petani dan nelayan; (3) peningkatan produktivitas pertanian maupun perikanan, dalam upaya untuk mengatasi defisit produksi yang terjadi pada beberapa komoditas pangan utama. Dukungan anggaran

dilakukan melalui penyediaan bantuan sarpras produksi pertanian dan perikanan, bantuan benih dan bibit unggul, bantuan pupuk, pengembangan *smart farming* dan digitalisasi pertanian (*e-agriculture*), pengembangan kawasan secara terintegrasi, penguatan food estate dan korporasi petani, pengairan/irigasi, pendampingan dan penyuluhan, serta upaya penanggulangan penyakit dan hama (kemenkeu.go.id, 2022).

Beberapa target *output* strategis bidang ketahanan pangan pada tahun 2023 adalah: (1) kawasan padi/fasilitas penerapan budidaya padi seluas 229.800 Ha; (2) kawasan jagung/fasilitas penerapan budidaya jagung seluas 40.000 Ha; (3) kawasan kedelai/ fasilitas penerapan budidaya kedelai seluas 150.000 Ha; (4) kawasan bawang merah seluas 5.000 Ha; (5) optimalisasi reproduksi sebanyak 4.000.000 akseptor; (6) bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan sebanyak 9.275 unit; (7) benih dan calon induk ikan yang disalurkan kepada masyarakat sebanyak 118 juta ekor; (8) bantuan sarana *chest freezer* (peti beku) 300 unit; (9) pembangunan bendungan lanjutan sebanyak 22 unit dan bendungan baru sebanyak 7 unit; (10) pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi seluas 6.900 Ha oleh pusat dan 48.564 Ha oleh daerah; (11) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 98.700 Ha oleh pusat dan 111.647 Ha oleh daerah; (12) pembangunan jalan pertanian 2.589 unit; (13) pembangunan olahan pakan ternak 495 unit; (14) pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana 53 pelabuhan perikanan; (15) pembangunan/ rehabilitasi 97 unit pembenihan; dan (16) dana ketahanan pangan dan pertanian untuk 1.255 kelompok masyarakat. Melalui upaya pencapaian target output strategis tersebut, pemerintah berharap dapat menjaga nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) masing-masing pada kisaran 105-107 dan 107-108 pada tahun 2023 (kemenkeu.go.id, 2022).



Gambar 1. Anggaran Ketahanan Pangan, 2018-2023 (dalam Triliun Rupiah)

Sumber: Kemenkeu, 2022.

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan dan pencapaian berbagai *output* strategis di atas, anggaran ketahanan pangan dalam APBN Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp94.984,1 miliar (kemenkeu.go.id, 2022). Sebagian besar anggaran ketahanan pangan tahun 2023 dialokasikan melalui BPP, terutama belanja K/L yang terdiri atas belanja pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas pokok di sektor pangan, serta Kementerian PUPR terkait infrastruktur pertanian (irigasi dan waduk/bendungan). Sementara itu, alokasi melalui belanja pemerintah pusat non-K/L meliputi penyaluran subsidi pupuk (pupuk cair dan noncair), subsidi bunga kredit resi gudang, antisipasi atas stok beras pemerintah dan stabilisasi harga pangan.

Alokasi anggaran ketahanan pangan Indonesia 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,9% menjadi Rp95 triliun dari tahun 2022 di angka Rp94,1 triliun (kemenkeu.go.id, 2022). Dengan kenaikan anggaran ketahanan pangan, diharapkan pemerintah dapat menjaga ketersediaan stok sehingga tidak ada lonjakan harga sehingga tingkat inflasi bisa ditekan. Perkembangan alokasi anggaran ketahanan pangan tahun 2018-2023 disajikan pada Gambar 1.

Penutup

Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peranan petani, masyarakat (pedagang pasar) serta pengusaha agar lebih dahulu mementingkan kebutuhan dalam negeri agar ketahanan pangan tetap terjaga. Salah satunya adalah menjaga ketersediaan stok dan keberlanjutan distribusi (*supply*). Fluktuasi harga pangan pokok sangat sensitif terhadap gejolak pasar dan dapat meningkatkan inflasi dalam jangka pendek.

Kedepan, perlu terus terbangun sinergitas antara pemerintah, petani, dan pengusaha agar bersama-sama menjaga ketahanan pangan dari ancaman krisis pangan dan resesi ekonomi tahun 2023. Komisi IV dan VI DPR RI melalui fungsi pengawasan dan legislasi harus memastikan agar penggunaan anggaran ketahanan pangan sesuai dengan kecukupan dan efektif sesuai target output. DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi di antara seluruh kementerian/ lembaga beserta *stakeholder* lainnya untuk mencegah tumpang tindih tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program ketahanan pangan.

Referensi

"Dunia Dibayangi Krisis Pangan di 2023, Apa Langkah Kementan", 12 Oktober 2022, <https://www.merdeka.com/uang/dunia-dibayangi-krisis-pangan-di-2023-apa-langkah-disiapkan-kementan.html>, diakses 18 Oktober 2022.

"Ketersediaan Pangan Dijamin", *Bisnis Indonesia*, 17 Oktober 2022, hal. 3.

"Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2023", <http://www.media.kemenkeu.go.id>, diakses 17 Oktober 2022.

"4 Pilar Ketahanan Pangan di Tengah Ancaman Resesi 2023", 16 Oktober 2022, <https://www.kompasiana.com/achmadirfan5199/634c1d46075df217aa215222/4-pilar-ketahanan-pangan-di-tengah-ancaman-resesi-2023>, diakses 17 Oktober 2022



Niken Paramita Purwanto
niken.purwanto@dpr.go.id.

Niken Paramita Purwanto, Analis Legislatif Muda Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI, dengan kepakaran bidang Kebijakan Publik. Lahir di Jakarta, pada 25 Juni 1977, menyelesaikan pendidikan Sarjana Manajemen di Universitas Trisakti, kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan Magister Akuntansi di Universitas Indonesia.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.